
Tata Cara Peralihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Akta

MEMBANGUN BERSAMA RUMAH AGRARIA

Hukum Agraria Indonesia

Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum

Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia

Sistem Hukum Benda Nasional

Pengembangan Wilayah

Hukum Agraria

Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia Pengaturan Serta Prosedur Dan Tata Cara

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Problematika Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah

Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan

Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia

Ikhlas beramal

Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)

Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia
Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah
Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya
Hukum Agraria
Hukum Lelang
Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia
Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan
97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti
Ke Mana Hartaku akan Berlabuh: Memahami Harta Warisan yang Ditinggalkan
Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah
Sari laporan penelitian dan survei, 1950-1980
Property Top Secret Buku Pintar Bisnis & Investasi Properti di Era Revolusi Industri
4.0
SERI IKHTISAR HUKUM EKONOMI DAN BISNIS BUKU I: PENGANTAR HUKUM EKONI
Awat Jangan Beli Tanah Sengketa
TEORI DAN PRAKTEK HAK TANGGUNGAN
Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking di Indonesia
Awat Jangan Beli Tanah Sengketa

PANDUAN MENGURUS SERTIFIKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance
(IC-LAW 2023)

HUKUM AGRARIA KONTEMPORER : Relasinya dengan Pembangunan Ekonomi di
Indonesia

HUKUM AGRARIA

Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh?

ASPEK HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

*Tata Cara
Peralihan Hak
Tanah Dan
Bangunan
Dengan Akta* *Downloaded
from
business.itu.edu
by guest*

LIA DOMINIQUE

**MEMBANGUN BERSAMA
RUMAH AGRARIA** Jakad
Media Publishing
Tujuan utama
pengembangan wilayah

adalah pemerataan
pengembangan
antarwilayah baik secara
fisik maupun sosial
ekonomi wilayah. Dalam
perencanaan
pengembangan wilayah
perlu didukung ilmu lain
yang berhubungan
dengan pengembangan
fisik dan ekonomi wilayah,

seperti ilmu evaluasi dan
perencanaan penggunaan
sumber daya lahan, ilmu
penataan ruang dan
pengembangan kawasan,
ilmu pengembangan
wilayah perdesaan dan
perkotaan, ilmu
pengembangan wilayah
pesisir dan pulau-pulau
kecil, serta ilmu

pemekaran wilayah administrasi. Di dalam buku ini membahas berbagai konsep perencanaan pendukung pengembangan wilayah, dimulai dari konsep tipologi dan teori pengembangan wilayah, seperti teori lokasi, pusat pertumbuhan, dan agropolitan. Di dalam perencanaan pengembangan wilayah perlu didukung evaluasi dan perencanaan penggunaan lahan baik secara fisik maupun sosial ekonomi, perencanaan pengembangan kawasan

dan penataan ruang, agar pengembangan wilayah yang direncanakan dapat saling bersinergi bukan saling berantagonis. Perencanaan pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan sangat diperlukan dalam perencanaan pengembangan wilayah yang banyak berhubungan dengan pengelolaan lahan perkotaan dan prasarana kota. Pengembangan wilayah pesisir juga termasuk dalam perencanaan pengembangan wdayah

yang membahas pengembangan potensi dan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang sangat berpotensi dalam pengembangan fisik maupun sosial ekonomi wilayah. Fenomena pemekaran wilayah yang banyak dilakukan saat ini perlu pula dicermati karena fenomena ini juga termasuk dalam ranah pengembangan wilayah, yaitu pengembangan wilayah administrasi. Kelayakan Pemekaran Wilayah juga dibahas dalam buku ini karena

berhubungan dengan pengembangan wilayah administrasi, yang membahas dan mengevaluasi berbagai faktor penunjang pemekaran wilayah seperti kependudukan, kemampuan ekonomi daerah, potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, kondisi Polbudhankam, kesejahteraan, luas daerah dan rentang kendali, untuk mengetahui apakah pemekaran wilayah yang dimaksud sudah layak atau belum. ***

Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Hukum Agraria Indonesia Pustaka Yustisia
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan buku ajar ini yang berjudul Hukum Agraria. "Hukum Agraria" adalah sebuah karya yang mengupas secara mendalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan

pertanian, tanah, dan sumber daya alam. Buku ini merangkum beragam peraturan dan prinsip hukum yang mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam lainnya. Maka sangat disarankan kepadapembaca dan penggiat hukum atau pembaca yang lainnya untuk membaca literatur-literatur hukum agraria yang terpisah lainnya demi untuk menambah pemahaman kita didalam hukum agraria ini. Pada

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan buku ini, terutama kepada teman-teman sejawat yang telah banyak memberikan suport serta ide-ide kesempatan untuk menerbitkan buku ini. Tak lupa pula pada kesempatan ini penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya serta terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada penulis-penulis yang bukunya sudah penulis jadikan rujukan

serta pedoman untuk kutipan pada buku ini, sehingga bisa buku ajar ini selesai sungguhpun ada kekurangan. Andaikan nanti ada kesalahan saya mohon dimaafkan jika ada kekurangan insya Allah penulis revisi. Teristimewa pula kepada Penerbit terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerja samanya yang telah berkenan untuk menerbitkan dan mempublikasikan buku ini. Sinar Grafika

Buku ini membahas tentang tata cara peralihan hak atas tanah. Tanah pada dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang tak dapat dipisahkan dengan alur kehidupan bermasyarakat. Setiap hari terjadi berbagai macam peralihan hak atas tanah baik hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha ataupun hak pakai. Dalam buku ini terdapat pembahasan ringkas dan singkat namun tetap mengedepankan materi yang mudah dipahami tentang tata cara peralihan hak atas tanah.

**Praktik Profesional
Hukum Gagasan
Pemikiran Tentang
Penegakan Hukum**

Sinar Grafika

Buku ini berisi tentang berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, yang seharusnya penegakkannya dilandasi dengan nilai-nilai keadilan maupun keagamaan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena hukum hadir untuk menjamin keadilan setiap warga negara Indonesia. Tujuan tim penulis membuat buku ini, selain

untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta juga sebagai kontribusi penulis untuk pembangunan (penegakan) hukum di Indonesia.

**Kebijakan dan
Administrasi
Perpajakan Daerah di
Indonesia** Pustaka

Peradaban
?Sangat bermanfaat.
Sangat saya
rekomendasikan sebagai
pedoman dan rujukan

awal.? ?Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar FHUI ? Apakah Perjanjian Jual Beli tanah antara orangtua dan anak, atau antara suami dan istri itu sah menurut hukum? ? Saya akan membeli rumah, tetapi nama yang tercantum di sertifikat bukan nama si penjual, mengapa dan bagaimana seharusnya? ? Saya menikah dengan WNA, lalu bagaimana status tanah warisan saya? ? Pada dokumen tanah yang akan saya beli, ternyata pihak kantor pajak menerbitkan

tagihan PBB ganda, bagaimana dan ke mana saya harus melakukan verifikasi? Masalah kenotariatan dan pertanahan merupakan masalah yang akrab dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, kebanyakan orang merasa asing? dengan masalah ini. Untuk itu, berdasarkan pengalamannya belasan tahun selaku praktisi, pengajar, dan pelatih kenotariatan, penulis menghadirkan serial Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer. Penulis

menyertakan banyak ilustrasi, contoh kasus, dan analogi dalam kehidupan sehari-hari. Tanya jawab masalah yang sering muncul pun menyertai pembahasan tentang Hukum Pertanahan ini. Ini memberikan wacana baru bahwa mempelajari dan menerapkan hukum itu sangat mudah dan praktis. Tak hanya masyarakat awam yang akan mendapatkan kiat praktis sebelum meminta bantuan notaris, para mahasiswa hukum dan/atau kenotariatan

akan memperoleh pencerahan pula. Bahkan, para praktisi hukum akan mendapatkan alternatif solusi dalam menangani kasus pertanahan. [Mizan, Kaifa, Hukum, Panduan, Indonesia]
Sistem Hukum Benda Nasional Kencana
 Sesuai kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD), masing-masing daerah harus membuat peraturan daerah dengan mengadopsi UU PDRD No. 28 Tahun 2009 sebagai acuan. Dalam hal ini, kepala daerah harus

membangun daerahnya dengan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, meskipun ada bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Fiskus pun berupaya mendongkrak penerimaan daerah dari sektor pajak dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak untuk membangun kemandirian pendanaan pembangunan dan merealisasikan target pajak daerah yang sangat signifikan dalam komposisi APBD. Chairil Anwar Pohan, yang

berpengalaman sebagai senior eksekutif korporat, konsultan pajak, peneliti, sekaligus akademisi, menganalisis kebijakan & administrasi Pajak Daerah & Retribusi Daerah dengan menggunakan indikator pengukuran kinerja PDRD serta teori yang relevan. Yang secara komprehensif dibahas di sini antara lain: ¥ Teori dan Aplikasi Konsep Earmarking ¥ Kebijakan dan Administrasi Publik Pajak Daerah ¥ Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah ¥ Menilai Pajak Daerah ¥

Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ¥ Pembukuan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Buku ini terlalu penting untuk dilewatkan para mahasiswa, pengajar, konsultan pajak, praktisi bisnis, maupun birokrat yang mendalami perpajakan. Para akademisi dapat memanfaatkan buku ini sebagai buku ajar mata kuliah Pajak Daerah & Retribusi Daerah baik untuk tingkat strata satu maupun program vokasi/diploma jurusan administrasi perpajakan,

administrasi publik, dan administrasi bisnis/niaga, serta sebagai materi pelatihan perpajakan, termasuk Brevet A & B.

Pengembangan

Wilayah CV AMAL SALEH

Buku ini menjelaskan hak – hak yang ada dalam kepemilikan tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bngunan, Hak Pakai, Hak Sewa, dan Hak atas Tanah yang Bersifat Sementara. Dibahas juga tentang tata cara peralihan hak atas tanah melalui, Jual Beli, Tukar-menukar, Pewarisan dan Lelang.

Buku ini memberikan pemahaman dan pedoman penting bagi akademisi di bidang hukum agraria, praktisi, mahasiswa, maupun semua pihak yang terkait urusan peralihan hak atas tanah. Buku persembahan penerbit

MediaPressindoGroup
Hukum Agraria CV. Gita Lentera

Buku ini disusun untuk membantu calon peserta Ujian PPAT agar dapat memahami norma-norma hukum yang diujikan dalam bentuk tanya jawab dan soal-soal yang pernah

diujikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sehingga dengan adanya buku ini diharapkan bisa menjawab soal-soal yang diujikan dengan baik dan tepat. Terdiri atas dua belas bab dalam buku ini meliputi: Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Bab 3 Hukum Pertanahan Nasional Bab 4 Hak Atas Tanah Bab 5 Pendaftaran Tanah Bab 6 Peraturan Jabatan Pejabat

<p>Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bab 7 Pembuatan Akta PPAT Bab 8 Kode Etik PPAT Bab 9 Tanya Jawab Soal Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tahun 2017 Bab 10 Tanya Jawab Soal Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2016 Bab 11 Tanya Jawab Soal Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2015 Bab 12 Tanya Jawab Soal Ujian yang Tetap Keluar dalam Pelaksanaan Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari Tahun 2017, 2016 dan 2015.</p>	<p><i>Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia Pengaturan Serta Prosedur Dan Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</i> Penerbit Andi penulisan buku ini membahas bagaimana menemukan konstruksi hubungan hukum antara penye-lenggaraaan pembangunan rumah susun dengan pembeli dalam peralihan hak milik atas satuan rumah susun dan juga untuk menemukan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pembeli. Selesaiannya buku</p>	<p>ini tidak lepas dari bantuan ber-bagai pihak yang telah memberikan saran dan masukan terkait materi buku ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Rektor Universitas Narotama Surabaya yang terus mendo-rong Penulis untuk menghasilkan karya tulis yang ber-manfaat bagi dunia akademis. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga</p>
---	---	--

Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Jember dan Fakultas Hukum Narotama Surabaya.

Problematika Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah

Penerbit Alumni

On interreligious harmony in Indonesia.

Panduan Pelaksanaan Administrasi

Perpajakan Penerbit NEM

Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA, yang bertujuan

melakukan perombakan dan pembaruan hukum Agraria lama dengan meletakkan dasar-dasar hukum bagi penyusunan hukum Agraria Nasional, meletakkan dasar-dasar bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum Agraria Nasional, dan meletakkan dasar-dasar bagi kepastian hukum dan hak. Dengan lahirnya UUPA, maka aturan hukum tanah warisan Hindia Belanda yang diatur dalam Buku II BW tentang benda (khusus tanah), Agrarische Wet, dan peraturan

pelaksanaannya dihapuskan, dan pemerintah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut sumber daya agraria yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa Indonesia dalam menguasai, mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya agraria sampai dengan lahirnya Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat Indonesia. Buku ini memuat materi bahasan tentang konsepsi, dasar hukum, tujuan hukum Agraria, sejarah penyusunan hukum Agraria, Hukum Agraria Nasional, Hak Penguasaan Atas Tanah dalam Hukum Tanah Nasional, Pendaftaran Tanah, Landreform, dan Hak Tanggungan Atas Tanah. Buku ini berusaha membantu mahasiswa dan para pembaca hukum Agraria untuk memahami hukum Agraria secara menyeluruh. Buku ini sangat baik untuk

dipelajari oleh mahasiswa S-1 maupun S-2 dalam mempelajari dan memahami hukum Agraria Indonesia. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah* Muhammadiyah University Press Buku Politik Hukum Pertanahan ini diperuntukkan bagi mahasiswa S2 Program Magister Kenotariatan sehingga uraian di dalamnya juga disampaikan contoh soal yang berguna untuk menyiapkan mahasiswa

dalam menghadapi kasus-kasus pertanahan di masyarakat. Buku ini juga dapat dibaca juga oleh mahasiswa S1 yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (PPHAT) dan juga dapat dibaca oleh kalangan praktisi. **Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia** PT Elex Media Komputindo Buku ini mnegkaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup keberadaan hak-hak atas tanah di Indonesia, baik hak-hak

atas tanah yang bersumber pada hukum adat maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum perdata barat. Dikaji pula macam-macam pemindahan hak atas tanah dan peralihan (konversi) hak atas tanah setelah Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) diberlakukan. Di samping itu, dipelajari tentang lembaga hukum pendaftaran tanah terkait sistem pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, aturan-aturan pendaftaran tanah,

pejabat pendaftaran tanah, dan berbagai permasalahan yang kerap timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Diulas pula perbandingan pendaftaran tanah di berbagai negara, serta beberapa yurisprudensi seputar jual beli dan pendaftaran tanah yang dianalisis secara objektif dalam bingkai teori dan asas hukum pertahanan. Buku yang berkualitas ini patut dibaca oleh kalangan akademis, praktis hukum pertahanan, kalangan perbankan, aparat

pemerintah, pihak pengembang, dan masyarakat umum yang ingin memahami dengan baik eksistensi dan permasalahan hak atas tanah dan pendaftarannya di tanah air.

Ikhlas beramal

Airlangga University Press
Buku ini berisi tiga pokok bahasan besar, yaitu: Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Ketiga pokok bahasan besar tersebut diatur dalam Hukum Tanah Nasional yang

ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan sebutan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak atas penguasaan atas tanah yang bersifat perseorangan yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh orang per orang warganegara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum

privat, atau badan hukum publik. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia) Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) CV. Beta Aksara Warisan kerap luput dari perhatian masyarakat serta banyak sekali disalahartikan dalam masyarakat di Indonesia. Warisan sangat identik dikaitkan dengan hal apabila seseorang meninggal dunia, harus dapat kita pahami bila seseorang meninggal dunia hubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu

saja, bila seseorang memiliki keluarga maka akan terjadinya hubungan hukum terkait harta benda yang ditinggalkan, itulah yang kita sebut dengan warisan. Buku ini secara lebih mendalam lagi membahas mengenai sistem pewarisan menurut Hukum Perdata Barat, Pewarisan menurut Hukum Islam, dan Pewarisan menurut Hukum adat, dengan adanya ketiga sistem tersebut belum secara penuh dapat dipahami oleh masyarakat dan berlaku secara nyata

didalam masyarakat, sehingga pembahasan mengenai ketiga sistem pewarisan ini sangatlah penting. Pembahasan mengenai ketiga sistem pewarisan tersebut, tidak lepas juga dari pembahasan mengenai mengenai perkawinan, dan juga kematian yang akan berujung pada sistem pewarisan. Pembahasan mengenai sistem pewarisan juga berkenaan dengan pewarisan dalam dan antar golongan, dan juga menyangkut mengenai ahli waris baik ahli waris

sebagai WNI maupun WNA. Untuk mempermudah pembaca dalam mencari solusi setiap kasus yang dialami maka dalam buku ini kami menyajikan bukan hanya teori yang menjadi dasar dari pewarisan akan tetapi kami memberikan contoh-contoh kasus yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari didalam masyarakat beserta dengan solusinya. **Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia** Elex Media Komputindo

Banyaknya terjadi penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing dan badan hukum, sehingga mendorong penulis untuk menerbitkan buku ini dari hasil disertasi penulis guna memberikan pengetahuan dan mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guna meluluskan keinginannya yang melanggar aturan hukum yang ada. Sehingga perlu diketahui

oleh pembaca agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum atas kepemilikan tanah yang dikehendaknya. Sistem pertanahan nasional yang dapat memberikan sarana dalam mengatur sumber daya alam tersebut untuk mencapai pembangunan yang diharapkan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang meliputi objek hak atas tanah, subjek hak atas tanah dan status objek hak atas tanah.

Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Airlangga University Press
Tanah tidak dapat dipungkiri merupakan elemen yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nilai ekonomi tanah akan meningkat karena kebutuhan manusia dan luas tanah relatif tidak bertambah. Oleh karena itu, tidak heran tanah memiliki berbagai dimensi strategis yang sangat rawan dengan konflik dan sengketa. Salah satu upaya mencegah dan

meminimalisir konflik dan sengketa menyangkut tanah adalah mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah. Sasaran sistem pendaftaran tanah adalah mewujudkan kepastian hukum seluruh bidang tanah di Indonesia. Pemberlakuan UUPA dengan peraturan turunan yang terakhir, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan sistem

pendaftaran tanah di Indonesia. Berbagai aturan mengenai prosedur dan persyaratan tentang kegiatan menyangkut pendaftaran tanah disusun agar semua pihak yang berkepentingan dengan tanah mengetahui status tanahnya dan dapat memperoleh tanda bukti haknya. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* RAIH ASA SUKSES Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar

Grafika
Hukum Agraria Prenada Media
 TEMUKAN JAWABANNYA DI buku ini ! Sudah menjadi rahasia umum bahwa sengketa tanah kerap terjadi di Indonesia. Untuk itu, sebagai pemilik lahan tentu harus lebih waspada lagi agar terhindar dari kasus sengketa tanah. Dengan semakin mendesaknya peran dan manfaat tanah terhadap kehidupan makhluk hidup, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dengan ketentuan hukum agar

pemanfaatan tanah bisa optimal dan dapat memberikan kesejahteraan semua makhluk hidup, khususnya manusia. Dalam kepemilikan semua kebendaan khususnya tanah, harus dilengkapi bukti kepemilikan yang sah, agar ada kepastian hukum. Apabila kepemilikan tanah tidak dilengkapi dengan alat bukti yang sah, maka kepemilikannya tidak akan dijamin oleh ketentuan hukum.
Hukum Lelang Citra Aditya Bakti

Isi buku ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku, disusun dan disajikan secara lengkap, rinci, runtut, dan runut sehingga memudahkan para pembaca memahami tentang pengaturan dan prosedur serta tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selama ini belum ada buku yang memuat pengaturan, prosedur, dan tata cara pengadaan tanah secara lengkap dan terperinci. Buku ini terdiri

atas tiga bagian, yaitu tentang Perkembangan Peraturan Perolehan Tanah (dari Pencabutan Hak Atas Tanah ke Pembebasan Tanah sampai Pengadaan Tanah); tentang Pengaturan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan tentang Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Manfaat yang ingin diperoleh dari buku ini, baik bagi kepentingan akademik maupun

kepentingan praktis. Untuk instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum, buku ini sangat membantu memahami pengaturan, prosedur, dan tata cara memperoleh tanah melalui pengadaan tanah. Untuk masyarakat umum khususnya yang terkena proses pengadaan tanah, buku ini membantu pemahaman bagaimana pengadaan tanah itu dilakukan dan sekaligus memberikan informasi tentang hak-hak dan kewajiban yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Buku ini juga ditujukan untuk para	mahasiswa Fakultas Hukum sebagai bahan untuk mengikuti mata kuliah Hukum Agraria dan khususnya mata kuliah	Hukum Pengadaan Tanah. Buku persembahan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI #CitraAdityaBakti
---	--	--

Best Sellers - Books :

- [Young Forever: The Secrets To Living Your Longest, Healthiest Life \(the Dr. Hyman Library, 11\) By Dr. Mark Hyman Md](#)
- [The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times](#)
- [Beyond The Story: 10-year Record Of Bts By Bts](#)
- [The Four Agreements: A Practical Guide To Personal Freedom \(a Toltec Wisdom Book\) By Don Miguel Ruiz](#)
- [Twisted Hate \(twisted, 3\)](#)
- [Demon Copperhead: A Pulitzer Prize Winner](#)
- [Fast Like A Girl: A Woman's Guide To Using The Healing Power Of Fasting To Burn Fat, Boost Energy, And Balance Hormones By Dr. Mindy Pelz](#)
- [Oh, The Places You'll Go!](#)
- [Things We Never Got Over \(knockemout\) By Lucy Score](#)
- [Remarkably Bright Creatures: A Read With Jenna Pick By Shelby Van Pelt](#)